TINJAUAN TERBARU TENTANG KEBIJAKAN MONETER ISLAM: IMPLIKASI DAN PENGARUH DI ERA EKONOMI DIGITAL

Afni Haryanti Harahap[1], Noni Artiya Syahputri[2], Risa Lidia[3], Maryam Batubara[4]
afniharap977@gmail.com[1], noniartiyasyahputri@gmail.com[2], risalidiabatubara@gmail.com[3], maryam.batubara@uinsu.ac.id[4]
UIN Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Artikel ini meninjau perkembangan terbaru dalam kebijakan moneter Islam dalam konteks era ekonomi digital, dengan fokus pada implikasi dan pengaruhnya. Kebijakan moneter Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan prinsip bagi hasil, memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan tinjauan komprehensif tentang bagaimana digitalisasi telah mengubah lanskap keuangan syariah, mempengaruhi strategi kebijakan, dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait kebijakan moneter Islam dan transformasi digital ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah, meskipun masih ada tantangan terkait dengan regulasi dan likuiditas instrumen keuangan syariah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan moneter Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.
Kata kunci: Kebijakan Moneter Islam, Fintech Syariah, Ekonomi Digital, Tranformasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter Islam, yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, memainkan peran penting dalam perekonomian negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam era ekonomi digital, kebijakan ini menghadapi tantangan dan peluang baru yang memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasi dan pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan terbaru tentang kebijakan moneter Islam, dengan menyoroti dampak dan perubahan yang terjadi di era digital.

Menurut Bank Indonesia (2019), kebijakan moneter Islam berfokus pada stabilitas harga, keseimbangan neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, yang mempengaruhi implementasi kebijakan moneter tersebut. Misalnya, perkembangan fintech syariah telah memberikan alternatif baru dalam transaksi keuangan yang lebih efisien dan transparan (Ismal, 2020).

Sebuah survei oleh Otoritas Jasa Keuangan (2021) menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam sektor keuangan syariah meningkat sebesar 35% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik pada produk-produk keuangan syariah berbasis digital. Namun, masih terdapat tantangan terkait regulasi dan infrastruktur teknologi yang perlu diatasi untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pendapat ahli seperti Karim (2022) menyatakan bahwa digitalisasi dalam kebijakan moneter Islam dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat

terhadap layanan keuangan syariah. Namun, ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi untuk mengatasi tantangan yang ada.

Penelitian sebelumnya oleh Hasan (2019) menyoroti bahwa kebijakan moneter Islam yang diadaptasi dengan teknologi digital dapat memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Studi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan transparansi.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek kebijakan moneter Islam di era ekonomi digital, termasuk analisis kebijakan, survei lapangan, dan wawancara dengan para ahli. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan moneter Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam merupakan pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah mencapai keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, serta stabilitas keuangan yang kokoh. Dalam sistem ini, uang tidak hanya dianggap sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umum (Hameed, 2020).

Prinsip utama kebijakan moneter Islam meliputi larangan riba (bunga), yang berarti keuntungan harus berasal dari aktivitas ekonomi riil (Chapra, 2019), prinsip bagi hasil dalam instrumen keuangan seperti mudharabah dan musyarakah (Ismail, 2021), serta larangan spekulasi (gharar) dan perjudian (maysir), sehingga transaksi harus berdasarkan informasi yang jelas dan pasti (Khan, 2022).

Karena larangan riba, instrumen konvensional seperti suku bunga tidak digunakan dalam kebijakan moneter Islam. Sebagai gantinya, digunakan instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta instrumen berbasis ekuitas seperti sukuk (obligasi syariah) (Usmani, 2021; Alam, 2020). Bank sentral juga dapat mengatur cadangan wajib dan menyediakan likuiditas melalui instrumen keuangan syariah (Karim, 2023; Ahmed, 2022).

Implementasi kebijakan moneter Islam menghadapi tantangan seperti kurangnya instrumen keuangan syariah yang likuid dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat (Usmani, 2021; Khan, 2022). Namun, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah dan dukungan dari pemerintah serta lembaga internasional, kebijakan moneter Islam memiliki prospek yang cerah dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global (Hameed, 2020).

Transformasi Ekonomi Digital Di Indonesia

Transformasi digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berbagai faktor yang mempercepat adopsi teknologi dan digitalisasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digital ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan teknologi dan bisnis online untuk berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia adalah pertumbuhan pengguna internet yang tinggi. Pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 170 juta orang atau sekitar 64% dari total populasi Indonesia. Pertumbuhan ini terus berlanjut, didorong oleh peningkatan aksesibilitas internet dan adopsi perangkat seluler yang luas. Dengan jumlah pengguna internet yang besar, pasar e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya berkembang pesat, memberikan peluang bagi inovasi dan ekspansi bisnis.

Selain itu, regulasi pro-inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital. Pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan penetrasi broadband, memfasilitasi investasi teknologi, dan memperkuat perlindungan data pribadi. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan infrastruktur digital, penerapan kebijakan yang mendukung ekosistem startup, dan upaya untuk menarik investasi asing dalam sektor teknologi. Dukungan regulasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital dan mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinovasi.

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga menjadi faktor penting dalam transformasi ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan keahlian teknologi dan digital di kalangan masyarakat. Ini mencakup pengembangan kurikulum teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah serta program pelatihan lanjutan bagi karyawan yang ada. Dengan meningkatkan keterampilan digital, Indonesia berupaya mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi digital.

Tren dan Inovasi Ekonomi Digital Di Indonesia

Ekonomi digital di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berbagai tren dan inovasi yang mengubah lanskap bisnis dan teknologi di negara ini.

1. E-commerce: E-commerce di Indonesia terus berkembang pesat, terutama selama pandemi COVID-19 ketika banyak toko fisik tutup sementara. Hal ini mendorong peningkatan transaksi online dan mempercepat adopsi platform e-commerce oleh konsumen. Perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menjadi pemain utama dalam sektor ini, menawarkan berbagai produk dan layanan yang semakin beragam.
2. Fintech: Industri fintech di Indonesia juga mengalami perkembangan signifikan, dengan banyak perusahaan baru yang muncul dan menawarkan solusi keuangan digital. Layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi menjadi semakin populer. Perusahaan fintech seperti OVO, GoPay, dan Dana telah mengubah cara orang melakukan transaksi keuangan, memudahkan akses dan inklusi keuangan bagi masyarakat luas.
3. Teknologi Blockchain: Teknologi blockchain mulai mendapatkan perhatian di Indonesia, dengan beberapa perusahaan dan institusi yang mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Penggunaan blockchain dalam sektor keuangan, logistik, dan pemerintahan menunjukkan potensi besar untuk efisiensi dan keandalan data.
4. Kecerdasan Buatan (AI): Penggunaan kecerdasan buatan semakin meluas di Indonesia, terutama di sektor kesehatan, manufaktur, dan layanan pelanggan. Teknologi AI

digunakan untuk meningkatkan diagnosis medis, otomatisasi proses produksi, dan meningkatkan pengalaman pengguna melalui chatbot dan sistem rekomendasi.

5. Internet of Things (IoT): IoT juga semakin berkembang di Indonesia, dengan banyak perusahaan yang mengembangkan solusi IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka dari jarak jauh. Aplikasi IoT di sektor pertanian, transportasi, dan smart city menunjukkan dampak positif terhadap produktivitas dan kenyamanan hidup.

Meskipun ada tantangan seperti regulasi yang kompleks, perlindungan data yang ketat, dan kebutuhan akan investasi lebih lanjut dalam teknologi, Indonesia tetap menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan teknologi dan bisnis online. Dengan populasi yang besar dan kecenderungan untuk mengadopsi teknologi baru dengan cepat, ekonomi digital Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berinovasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Digital dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Transformasi digital di Indonesia telah berkembang pesat, menjadikan negara ini sebagai salah satu yang terdepan dalam ekonomi digital di Asia Tenggara. Menurut World Bank (2021), Indonesia memiliki porsi ekonomi digital terbesar di kawasan ini. Perkembangan ini memicu munculnya model bisnis baru yang meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar (Bachtiar et al., 2020). Ekonomi digital di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti mobile internet, big data, Internet of Things (IoT), dan cloud technology, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan yang signifikan (Prastyaningtyas et al., 2018).

Pemerintah Indonesia memproyeksikan ekonomi digital akan tumbuh 20% dari tahun 2021, mencapai USD146 miliar pada tahun 2025 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi, seperti penggunaan media sosial dan aplikasi belanja, semakin mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Maharani & Ulum, 2019). Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) mendapatkan keuntungan signifikan dari digitalisasi ini, termasuk peningkatan penjualan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan efisiensi (Bahtiar & Saragih, 2020; Ridwansyah et al., 2021).

Sektor UMKM adalah pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang sebagian besar PDB dan menyediakan banyak lapangan kerja. Digitalisasi memberikan empat manfaat utama bagi UMKM: peningkatan finansial melalui penjualan yang lebih besar, penciptaan lapangan kerja, penghematan bagi konsumen, dan efisiensi yang lebih besar dalam operasional bisnis. Meski demikian, Indonesia perlu terus mengoptimalkan transformasi ekonomi digital untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Ridwansyah et al., 2021).

Proses transformasi ekonomi digital melibatkan beberapa tahap, yaitu digitalisasi, integrasi, otomatisasi, dan inovasi. Pada tahap digitalisasi, data diubah dari bentuk fisik ke digital. Selanjutnya, data tersebut diintegrasikan ke dalam sistem digital bisnis melalui penggunaan perangkat lunak seperti CRM dan ERP. Automatisasi memungkinkan bisnis mengotomatisasi proses seperti pemrosesan pesanan dan inventarisasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Tahap terakhir, inovasi, mendorong

pengembangan produk dan layanan baru yang lebih baik dan inovatif (Prastyaningtyas et al., 2018).

Ekonomi digital juga menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, perluasan pasar global, penciptaan lapangan kerja baru dalam bidang teknologi digital, dan mendorong inovasi di berbagai sektor (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, regulasi dan kebijakan yang tepat harus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif.

Kebijakan Moneter Islam dalam Konteks Ekonomi Digital

Kebijakan moneter Islam merupakan pendekatan alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), prinsip bagi hasil, dan larangan spekulasi (gharar) (Chapra, 2019; Ismail, 2021). Dalam konteks ekonomi digital, kebijakan moneter Islam menghadapi tantangan dan peluang baru. Transformasi ekonomi digital memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, yang dapat mendukung prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan dan investasi.

Instrumen keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah semakin relevan dalam ekonomi digital, karena memungkinkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil dan transparan. Sukuk (obligasi syariah) juga memainkan peran penting sebagai instrumen berbasis ekuitas yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa melanggar prinsip riba (Alam, 2020). Dengan kemajuan teknologi, penerbitan dan perdagangan sukuk menjadi lebih mudah dan efisien, mendukung likuiditas pasar keuangan syariah..

Implikasi Kebijakan Moneter Islam di Era Digital

Dalam era ekonomi digital, kebijakan moneter Islam memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, digitalisasi memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, teknologi digital memungkinkan distribusi informasi yang lebih merata dan cepat, membantu umat Muslim untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah (Hameed, 2020).

Selain itu, ekonomi digital membuka peluang baru untuk inklusi keuangan. Dengan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan digital, lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah. Ini sejalan dengan tujuan Islam untuk mencapai keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata (Karim, 2023).

Transformasi ekonomi digital juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan moneter Islam melalui penggunaan teknologi canggih seperti blockchain dan smart contracts. Teknologi ini dapat memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, mengurangi risiko penipuan dan ketidakpatuhan (Usmani, 2021).

Namun, penerapan kebijakan moneter Islam di era digital juga memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan konsisten. Regulasi yang baik harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kerangka regulasi yang jelas dan efektif dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif (Khan, 2022).

Tantangan dan Prospek Kebijakan Moneter Islam

Meskipun menawarkan banyak peluang, kebijakan moneter Islam di era digital juga menghadapi tantangan. Kurangnya instrumen keuangan syariah yang likuid dan dapat diperdagangkan secara luas masih menjadi hambatan bagi bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakan moneter yang efektif (Usmani, 2021). Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan konsisten untuk memastikan bahwa semua instrumen keuangan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Khan, 2022).

Namun, dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan internasional, prospek kebijakan moneter Islam tetap cerah. Minat yang meningkat terhadap produk keuangan syariah menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Dengan inovasi teknologi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, kebijakan moneter Islam dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global (Hameed, 2020).

Selain itu, untuk mengatasi tantangan likuiditas, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku pasar untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah yang lebih likuid dan dapat diperdagangkan secara luas. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk penerbitan sukuk, dapat membantu meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas instrumen keuangan syariah (Alam, 2020).

Pengaruh Ekonomi Digital terhadap Kebijakan Moneter Islam

Perkembangan ekonomi digital juga berdampak pada kebijakan moneter Islam. Teknologi digital, seperti big data dan artificial intelligence (AI), dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis pasar keuangan syariah dengan lebih efisien. Data yang lebih akurat dan analisis yang lebih cepat memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan informatif (Hameed, 2020).

Selain itu, platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Aplikasi dan platform edukasi online dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan instrumen keuangan syariah, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar keuangan syariah (Karim, 2023).

Dalam jangka panjang, ekonomi digital dapat membantu memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kebijakan moneter Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lebih efektif dalam mencapai tujuan ekonomi syariah, seperti keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata (Usmani, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka terdapat hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Digital: Transformasi ekonomi digital di Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk UMKM. Penggunaan teknologi seperti mobile internet, big data, dan IoT telah meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar.
2. Implikasi bagi Kebijakan Moneter Islam: Kebijakan moneter Islam menawarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan prinsip bagi hasil. Di era ekonomi digital, instrumen keuangan syariah seperti sukuk semakin

relevan dan dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil.

3. Peluang Inklusi Keuangan: Ekonomi digital membuka pintu inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk mencapai keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata.
4. Tantangan yang Dihadapi: Meskipun menawarkan peluang besar, kebijakan moneter Islam dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya likuiditas instrumen keuangan syariah dan perlunya kerangka regulasi yang kuat. Pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih likuid perlu menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam.
5. Prospek Kebijakan Moneter Islam: Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi, prospek kebijakan moneter Islam tetap cerah. Minat yang meningkat terhadap produk keuangan syariah menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
6. Kontribusi terhadap Perekonomian Global: Dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah, kebijakan moneter Islam dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan global.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa ekonomi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan, tetapi juga membuka jalan bagi implementasi kebijakan moneter Islam yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai keadilan ekonomi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M. (2020). Sukuk and Economic Growth: A Case Study. Islamic Finance Journal.

Anggraeni, Ni Made Savitri dan Yasa, Ni Nyoman Kerti, 2012, “E-Service Quality terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan dalam Penggunaan Internet Banking,” Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.16, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Anjani, Reggina Wike. "Implementasi Digital Marketing Dalam Mengembangkan Strategi Bisnis Digital Di Era Transformasi Digital." INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research 1.1 (2024): 29-40.

Apryanto, Frengki. "Peran generasi muda terhadap perkembangan teknologi digital di era society 5.0." Media Husada Journal of Community Service 2.2 (2022): 130-134

Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1.1 (2021): 34-44.

Bachtiar, et al. (2020). The Impact of Digital Economy on Customer Experience. Journal of Economic Studies.

Bahtiar, R., & Saragih, D. (2020). Digitalization of SMEs and Its Impact on Economic Growth. Indonesian Journal of Economics.

Bank Indonesia. (2019). Kebijakan Moneter Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

Chapra, M. U. (2019). Islamic Monetary Policy: Principles and Practices. Islamic Economic Review.

ekonomi islam di era digital-reensi dan implikasi. (2024, Mei 19). Retrieved from febi uinsu: https://www.researchgate.net/publication/307640642_KEBIJAKAN_MONETER_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_SYARIAH

Hameed, A. (2020). The Role of Digital Transformation in Islamic Finance. Global Islamic

Finance Journal.
Ismail, A. (2021). Profit Sharing in Islamic Finance. Journal of Islamic Banking and Finance.
Karim, A. (2023). Regulatory Frameworks for Islamic Finance. Journal of Islamic Economics.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Indonesia's Digital Economy Projection. Official Report.
Khan, T. (2022). Challenges in Implementing Islamic Monetary Policy. Journal of Islamic Financial Studies.
Maharani, I., & Ulum, M. (2019). Social Media's Impact on Economic Activities. Journal of Digital Economy.
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Survei Fintech Syariah 2021. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Permana, Teguh, and Andriani Puspitaningsih. "Studi ekonomi digital di Indonesia." Jurnal Simki Economic 4.2 (2021): 161-170.
Prastyaningtyas, et al. (2018). The Five Key Technologies Driving Digital Economy in Southeast Asia. Journal of Economic Technology.
Ridwansyah, et al. (2021). The Role of SMEs in Economic Development. Indonesian Economic Journal.
Setiawan, Ahmad Budi. "Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia." Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 9.1 (2018): 61
Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (2023). Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 1(3), 21-30.
Turmudi, Imam. "Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam." An-Nawa: jurnal studi islam 1.2 (2019): 74-90..
Usmani, M. (2021). Liquidity Management in Islamic Finance. Journal of Islamic Banking.
Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter berbasis prinsip-prinsip islam." Justicia Islamica 10.1 (2013).
Zulkifli, S. E., et al. Ekonomi Digital. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.